

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengelolaan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik karena adanya beberapa faktor sumber daya yang mampu menggerakkan jalannya organisasi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan. Aspek penerimaan merupakan salah satu faktor utama sebagai sumber daya finansial bagi penyelenggaraan roda pemerintah daerah agar bisa menciptakan kemandirian daerah serta mengelola sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien sehingga memperbesar keberhasilan pembangunan daerah.

Salah satu fenomena yang mencolok dari hubungan antara sistem pemerintah daerah dan pembangunan adalah ketergantungan pemerintah daerah yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan, pembangunan di daerah terutama fisik memang cukup pesat tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara daerah dengan pusat sebagai akibat pembangunan juga semakin besar. Ketergantungan fiskal terlihat dari relatif rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dominannya transfer dari pusat (Kuncoro, 2009:371)

Oleh karena itu dijadikanlah kebijakan desentralisasi yaitu melalui otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah dapat menggali sumber daya yang dimilikinya tanpa harus melibatkan pusat karena campur tangan pemerintah pusat dianggap daerah mengalami keterlambatan dalam pengembangan potensi yang dimiliki daerah.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 33 Tahun 2004 yang mengatur otonomi daerah dan fiskal. Kedua undang-undang ini mengatur tentang Pemerintah Daerah (Pemda) dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemda yang ditegaskan bahwa untuk pelaksanaan keuangan Pemda, pemerintah pusat akan mentransfer

Dana Transfer (DT) yang antara lain terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Dana Transfer (DT) adalah dana bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah (UU No. 33 tahun 2004). Dana Transfer (DT) tersebut diberikan untuk mengatasi persoalan ketimpangan fiskal dan adanya kebutuhan pendanaan daerah yang cukup besar. Disamping dari Dana Transfer (DT), Pemda memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sumber pendapatan yang diperoleh dari dalam daerah yang mana pemungutan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah.

Komponen penerimaan daerah yang meningkat dianggap sebagai modal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perumbuhan ekonomi daerah adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Indikator yang digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan produk nasional, yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) untuk tingkat nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota (Susanti, 2009:23).

Kota Palembang adalah Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan yang lahir melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 kini pertumbuhannya begitu pesat. Pesatnya pertumbuhan Kota Palembang ditunjukkan dengan adanya peningkatan pembangunan infrastruktur Kota Palembang seperti bandara, hotel-hotel, dan pusat-pusat perbelanjaan baru yang beroperasi. Disamping itu, Kota Palembang sering menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan even-even besar seperti Asean Games, Sea Games, MTQ International, ISG, dan University Games.

Dalam APBD terbaru terdiri atas tiga bagian, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pada belanja dibagi menjadi dua bagian yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Pada pembiayaan dikelompokkan menurut sumber-sumbernya yaitu sumber penerimaan dan pengeluaran daerah. Sedangkan, pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Transfer (DT), dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan yang sah. Dana Transfer (DT) terdiri dari DBH, DAU, dan DAK. PDRB jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah pada periode tertentu.

Berikut aspek pendapatan Kota Palembang dari PAD dan Dana Transfer (DT) serta PDRB sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 1.1**  
**Data Realisasi PAD , Dana Transfer (DT) dan PDRB Kota Palembang**

<b>Tahun</b>	<b>PAD (Rp)</b>	<b>Dana Transfer (DT) (Rp)</b>	<b>PDRB (Rp)</b>	<b>% PAD Thd PAD</b>	<b>% DT Thd PDRB</b>
2004	61586.18	452689,86	10.263.311	0.60	4.41
2005	78714.19	498384,07	11.152.820	0.71	4.47
2006	89676.05	720706,17	12.091.712	0.74	5.9
2007	123130.85	973.500,58	13.122.385	0.93	7.41
2008	139155,27	1.038.123,64	14.129.941	0.98	7.3
2009	165984.23	1.044.769,47	15.037.763	1.10	6.9
2010	214424.00	1.385.765,00	16.153.302	1.32	8.5
2011	349570.00	1.464.981,00	17.892.709	1.9	8.1
2012	518859.00	1.939.057	19.681.530	2.6	8.32
2013	558705.00	1.456.589	21.455.971	2.6	6.8

*Sumber : Data yang telah diolah*

Dari data diatas bahwa selama periode 2004-2013 PAD mengalami kenaikan sedangkan Dana Transfer (DT) dan PDRB tidak konstanta, dalam hal

ini mengalami kenaikan dan penurunan. Aspek penerimaan haruslah ditingkatkan seiring tuntutan pertumbuhan ekonomi Kota Palembang yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional untuk dilakukan secara terus-menerus demi perubahan yang lebih baik.

Dengan adanya perkembangan pembangunan Kota Palembang penulis tertarik meneliti studi kasus pada Kota Palembang. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Sianturi (2008). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penambahan variabel Dana Transfer (DT) dan sampel penelitian tidaklah sama dengan penelitian sebelumnya karena sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Kota Palembang, sehingga penelitian ini berjudul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer (DT) terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Palembang”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah yang dibahas adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer (DT) secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?
2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer (DT) secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi?

## **1.3 Ruang Lingkup Pembahasan**

Agar dalam penulisan laporan tidak menyimpang dari permasalahan yang ada, penulis membatasi ruang lingkup pembahasannya sesuai dengan pembahasan tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer (DT) terhadap pertumbuhan ekonomi secara parsial dan simultan Kota Palembang. Dengan analisis data berdasarkan laporan realisasi APBD tahun anggaran 2004-2013.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat**

### **1.4.1 Tujuan**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menguji secara empiris apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer (DT) secara parsial berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Menguji secara empiris Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer (DT) secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

### **1.4.2 Manfaat**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah pemahaman penulis mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer (DT) terhadap pertumbuhan ekonomi juga menambah pengetahuan tentang teori dan praktik-praktik akuntansi Pemerintahan Indonesia.
2. Bagi pemerintahan, penelitian ini bisa membuka wawasan baru berkenaan dengan pengaruh jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Transfer (DT) terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga dapat digunakan sebagai masukan untuk mendukung pembuatan keputusan atau kebijakan.
3. Sebagai bahan bacaan atau studi pustaka yang dapat bermanfaat dimasa yang akan datang, juga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk menyusun penelitian pada tahun berikutnya, dan memberikan masukan pada perkembangan akuntansi sektor publik.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Guna membuat laporan ini lebih terarah, maka secara garis besar penelitian ini nantinya akan terdiri dari lima bab dimana tiap-tiap bab memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika penulisan penelitian ini yaitu:

**Bab I           Pendahuluan**

Bab ini penulis menguraikan latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

**Bab II           Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi teori-teori pendukung yang digunakan dalam penulisan untuk melakukan analisis dan pembahasan. Adapun teori-teori yang digunakan yaitu pengertian APBD, Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer (DT) dan pertumbuhan ekonomi.

**Bab III          Metode Penelitian**

Bab ini menguraikan tentang jenis dan sumber data, model penelitian, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

**Bab IV          Analisis dan Pembahasan**

Bab ini membahas tentang hasil yang didapat setelah mengadakan penelitian yang mencakup gambaran umum penelitian, dan hasil penelitian dengan alat regresi berganda.

**Bab V           Simpulan dan Saran**

Bab ini berisi simpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan penulis dan dari simpulan dapat memberikan saran sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.